

Judul : DPR Segera "Tancap Gas" Rampungkan RAPBN 2017
Tanggal : Jumat, 03 Juni 2016
Surat Kabar : Republika
Halaman : 2

DPR Segera 'Tancap Gas' Rampungkan RAPBN 2017



Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan didampingi Ketua DPR Ade Komarudin, Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Agus Hermanto menerima Jawaban Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi DPR tentang KEM-PPKF 2017.

DPR dan Pemerintah telah selesai menyampaikan pandangan masing-masing untuk membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam RAPBN 2017. Dalam penyampaian pandangan yang dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/6), Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyampaikan jawaban terhadap pandangan fraksi-fraksi di DPR atas rancangan dari pemerintah.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, jawaban pemerintah dinilai telah memperhatikan kondisi terkini bangsa. Sehingga, DPR menganggap pemerintah telah merespons, mengolah, mengakomodasi, dan mengkodikasi seluruh masukan dari setiap fraksi, dalam laporan pandangan sikap fraksi terhadap kerangka ekonomi makro dalam RAPBN 2017.

Setelah mendengar tanggapan pemerintah, DPR melalui Badan Anggaran melakukan pendalaman atas pandangan pemerintah. Sehingga, tindak lanjut dari kerangka RAPBN itu diserahkan sepenuhnya dalam dinamisasi pembahasan oleh salah satu Alat Kelengkapan Dewan tersebut.

"Setelah siklus pembahasan APBN 2017, DPR langsung akan tancap gas membahas dua hal, yaitu RAPBN 2017 dan tentunya secara simultan, sembari menunggu *Tax Amnesty*, akan dibahas revisi UU APBN 2016, dalam bentuk APBN-Perubahan 2016," kata Taufik, usai memimpin Rapat Paripurna.

Politisi PAN tersebut menegaskan, dalam penyampaian jawaban, pemerintah tidak dalam posisi menolak atau menerima pandangan fraksi-fraksi. Tetapi, mereka melakukan proses matrikulasi dan kodifikasi usulan mana saja yang bisa diharmonisasikan.

Taufik mengungkapkan, DPR menargetkan

RAPBN 2017 rampung pada 15 Agustus 2016. Rencananya, RAPBN 2017 itu akan disampaikan oleh Presiden saat penyampaian Nota Keuangan dalam bentuk APBN 2017.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menanggapi pandangan dari F-PDIP, FG, F-Gerindra, F-PD, F-PAN, F-PKB, F-PPS, F-PPP, serta F-Hanura mengenai angka pertumbuhan ekonomi. Ia mengatakan, dengan mempertimbangkan berbagai peluang, potensi dan risiko, baik yang berasal dari domestik maupun eksternal, asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2017, yang diperkirakan berada pada kisaran 5,3 sampai 5,9 persen, cukup realistis.

Dari sisi eksternal, perkiraan membaiknya kinerja ekonomi global terutama negara-negara mitra dagang utama Indonesia tahun 2017, diharapkan dapat membantu perbaikan kinerja perekonomian nasional. "Sementara itu, faktor domestik terutama konsumsi rumah tangga dan investasi diperkirakan masih menjadi penopang utama perbaikan kinerja perekonomian nasional pada 2017," kata Bambang.

Ia menambahkan, perkiraan laju inflasi yang relatif terkendala, perluasan cakupan program kesejahteraan sosial, serta struktur demografi yang didominasi oleh kelompok penduduk usia produktif, diharapkan menjadi faktor pendorong masih kuatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

Kinerja investasi diperkirakan akan terus mengalami peningkatan, sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan pembangunan infrastruktur serta penguatan iklim investasi dan kondisi dunia usaha.

Terkait dengan perkiraan asumsi inflasi serta permasalahan inflasi dan potensi tekanan, Bambang mengatakan, saat ini potensi risiko yang berasal dari inflasi komponen bergeser perlu dicermati bersama, seiring dengan pergeseran musim tanam dan faktor musiman

lainnya.

Oleh karena itu, pengendalian harga pangan dan kebutuhan pokok sangat perlu dilakukan baik di tingkat pusat maupun daerah, mulai dari sisi produsen, distribusi hingga tingkat konsumen. "Melalui kebijakan fiskal, pemerintah juga telah menyiapkan dana cadangan stabilitas harga pangan dan cadangan besar pemerintah, guna mendukung upaya peningkatan ketahanan pangan nasional," ungkapnya.

Mengenai asumsi nilai tukar, Bambang menuturkan, pemerintah sepakat bahwa terdapat beberapa faktor risiko, baik dari sisi eksternal maupun internal, yang perlu dicermati dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Faktor eksternal yang paling berpengaruh saat ini adalah keberlangsungan normalisasi kebijakan moneter AS, perlambatan ekonomi Cina, serta masih berlangsungnya kebijakan *Quantitative Easing* di Kawasan Eropa dan Jepang.

Dari sisi domestik, perluasan dan pendalaman pasar keuangan serta partisipasi investor domestik yang masih perlu ditingkatkan, juga menjadi tantangan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah dalam jangka menengah.

Menyoal upaya perbaikan di bidang kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas dan kuantitas ketenagakerjaan, seperti yang disampaikan F-PDIP, F-PG, F-PD, F-PAN, F-PPS, F-Nasdem, serta F-Hanura, Bambang menjelaskan, pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan amanat tersebut.

Pemerintah menyadari, isu kesenjangan di Indonesia saat ini perlu mendapat perhatian khusus. Penurunan kesenjangan menjadi satu prioritas dan sasaran pembangunan nasional pada 2017. "Pengurangan kesenjangan secara tegas diamanatkan dalam Nawacita ketiga dengan membangun dari pinggiran serta memperkuat daerah dan desa," kata dia. ●